KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : DPR perlu berbenah tampung aspirasi rakyat
**Tanggal** : Rabu, 19 Oktober 2022
**Surat Kabar** : Kompas
**Halaman** : 2

KINERJA

# DPR Perlu Berbenah Tampung Aspirasi Rakyat

**JAKARTA, KOMPAS** — Penyerapan aspirasi publik dalam pengambilan kebijakan di DPR diakui belum optimal. DPR masih perlu terus berbenah diri. Meski secara prosedural ada mekanisme mendengarkan suara masyarakat, masih diperlukan kanal-kanal baru menampung suara tak terdengar.

Aspirasi masyarakat yang tak sepenuhnya terserap dalam setiap pengambilan kebijakan oleh DPR terekam dalam jajak pendapat Litbang *Kompas* pada 4-6 Oktober 2022. Dari 508 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi, mayoritas responden (78,7 persen) menilai DPR belum memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Bahkan, sepertiganya menilai lembaga perwakilan rakyat ini belum mengakomodasi pendapat publik.

Selain itu, hanya 16,1 persen responden yang menilai DPR sudah mendengar aspirasi masyarakat, Sebanyak 31 persen responden menilai DPR belum mendengar dan 47 persen menilai masih kurang.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, peringatan Hari Parlemen Nasional setiap 16 Oktober menjadi momentum DPR untuk terus berbenah meningkatkan kepercayaan publik. Ia meminta semua anggota Dewan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, terlebih saat ini DPR tengah menjalani masa reses. Di masa reses, setiap anggota DPR harus mau menemui konstituennya secara langsung untuk mengetahui masalah yang dihadapi. Selanjutnya, DPR terus berupaya mencari solusi sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPR.

"Kita baru akan tahu apa yang sebenarnya diharapkan rakyat saat bertemu langsung dengan mereka, mendengarkan dengan saksama kegelisahan dan aspirasi mereka sehingga saat masa sidang berlangsung, kita bisa sampaikan kepada pemerintah serta mencarikan solusinya bersama," kata Puan melalui keterangan tertulis, Selasa (18/10/2022).

DPR disadari sebagai lembaga yang belum sempurna. Masih terjadi kesalahan sejumlah anggota. Namun, hal itu tak bisa merepresentasikan institusi. Puan menambahkan, DPR terus beradaptasi dengan perubahan zaman sambil berupaya membuka saluran penyerapan aspirasi publik. Sebab, aspirasi publik tak hanya bisa diserap lewat pertemuan langsung, tetapi juga dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya, saat ini DPR punya laman daring www.dpr.go.id dan TV Parlemen. Selain memuat informasi kerja parlemen, juga penyampaian saran dan kritik.

Sejak 2019, kata Puan, pihaknya terus memperbaiki seluruh kanal komunikasi agar lebih mudah dijangkau. DPR pun berkolaborasi dengan sejumlah pemengaruh untuk mendorong perbaikan komunikasi yang kini lebih intens di media sosial. Dipastikan, setiap aspirasi dicatat sekalipun masukan disampaikan dalam bentuk sederhana di media sosial.

## Butuh kanal baru

Menanggapi hasil jajak pendapat *Kompas*, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, wajar jika publik merasa harus lebih dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan DPR. Sebab, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang lebih merepresentasikan suara dan supremasi publik.

Secara prosedural, upaya menyerap aspirasi rakyat sudah dilakukan melalui mekanisme resmi, misalnya rapat dengar pendapat umum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebijakan. Selain itu, ada pula kegiatan reses, ketika anggota DPR mendatangi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing untuk mendengarkan aspirasi dan menindaklanjutinya di DPR. "Namun, tentu ada yang belum merasa didengar sehingga harus ada lagi upaya atau membuka kanal baru agar suara-suara itu bisa disampaikan," ujar Saleh.

Menurut dia, salah satu kanal yang bisa dioptimalkan publik adalah melalui Badan Keahlian Dewan (BKD) sebagai lembaga formal yang menjadi tempat kajian awal lahirnya undang-undang. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi ke BKD, baik langsung maupun tertulis. Aspirasi tertulis yang dilengkapi data faktual dan argumentasi akademik tak hanya jadi masukan, tetapi juga referensi.

Saleh mengakui, tak semua aspirasi masyarakat bisa dipadukan karena umumnya sangat beragam. Dalam konteks tersebut, pihaknya harus mencari simpul dari keinginan publik untuk dijadikan satu kebijakan sehingga kerap muncul nuansa adanya sebagian masyarakat yang tak didengar karena sebagian lainnya menyampaikan hal berbeda.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR Jazuli Juwaini mengatakan, survei persepsi publik terhadap kinerja DPR sangat penting dan harus diapresiasi. Sebab, ini dapat memberikan masukan bagi DPR agar terus berbenah memperbaiki kinerja. Apalagi, temuan survei menyangkut jantung lembaga perwakilan, yakni representasi yang jadi dasar atau kerangka fungsi-fungsi DPR. (NIA)